



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PEMBINAAN ANGGOTA POLRI YANG TERLIBAT NARKOBA

Noverdi Puja Saputra
Peneliti Pertama
noverdi.saputra@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri telah mengirimkan sebanyak 136 anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obatan) untuk dibina di Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri. Kegiatan ini merupakan pengadopsian yang dilakukan Mabes Polri dari Kepolisian Daerah (Polda) Riau yang telah menerapkannya terlebih dahulu di bawah kepemimpinan Kapolda Irjen Agung Setia Imam. Pembinaan pemulihan profesi ini dilakukan agar para anggota yang terlibat narkoba dapat kembali menjadi personel yang Presisi dan berintegritas. Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo, mengatakan bahwa program pembinaan ini merupakan wujud perhatian dan kepedulian Pimpinan Polri kepada anggotanya yang bermasalah dengan narkoba untuk dapat dilakukan pembinaan. Tujuan pembinaan pemulihan profesi tersebut adalah untuk melatih keterampilan dan penguasaan diri, sehingga anggota Polri yang diduga terlibat penyalahgunaan narkoba kembali menjadi produktif dan dapat memberikan kontribusinya pada keluarga, masyarakat, dan institusi. Program pemulihan profesi ini terlaksana atas sinergi Divisi Propam Polri dengan Korps Brimob yang dipimpin oleh Dankor Irjen Anang Revandako.

Apabila setelah pembinaan masih ditemukan anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan narkoba atau pelanggaran lainnya, akan diberikan sanksi tegas hingga pemecatan. Yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkoba di sini adalah penyalahgunaan zat atau obat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang tidak sesuai dengan fungsinya. Apabila ada anggota yang terbukti sebagai pengedar, maka akan diberlakukan ketentuan hukum yang berlaku tanpa adanya kegiatan pembinaan pemulihan profesi ini, meskipun anggota tersebut juga merupakan pemakai.

Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Benny Mamoto, mendukung kegiatan pemulihan profesi ini karena melihat penyalahgunaan narkoba sebagai masalah kesehatan yang perlu direhabilitasi dan dipulihkan, bukan dipecat. Apabila dibiarkan atau dipecat, justru akan menjadi ancaman baru dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Jika dilihat dari program serupa yang telah dilakukan terlebih dahulu oleh Polda Riau, angka keberhasilannya cukup tinggi, hanya sedikit sekali yang gagal kemudian dilakukan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat). Benny Mamoto sangat optimis dengan kegiatan yang saat ini dilakukan oleh Mabes Polri tersebut.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad sangat mengapresiasi kegiatan ini, karena Polri telah melakukan keterbukaan dalam upaya membina dan merehabilitasi anggotanya yang bermasalah dengan narkoba. Menurutnya, langkah yang dilakukan Polri ini sudah melalui berbagai kajian dan pertimbangan yang matang sehingga para anggota ini dapat menjalankan tugasnya kelak dengan baik. Sufmi Dasco juga meminta agar langkah yang dilakukan oleh Polri tersebut dapat dicontoh oleh institusi lain dalam hal penanganan narkoba di lingkungan masing-masing.

Atensi DPR

Isu dan permasalahan mengenai pembinaan anggota Polri yang terlibat narkoba perlu mendapatkan atensi dari Komisi III DPR RI melalui fungsi pengawasan. Pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan mendukung dan mendorong, serta mengawasi Polri dalam menerapkan kegiatan pembinaan pemulihan profesi ini agar dapat diterapkan secara nasional sampai ke Polda. Selain itu, Komisi III DPR RI dapat meminta Polri untuk lebih memperkuat Divisi Propamnya. Penguatan tersebut dengan cara menambahkan kewenangan Divisi Propam untuk melakukan penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan etik. Diharapkan Divisi Propam tidak hanya melakukan pemeriksaan pada pelanggaran etik dan disiplin saja, tetapi juga dapat melakukan penegakan hukum atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan etik yang dilakukan oleh anggota Polri, sehingga Propam lebih optimal dalam melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap anggota Polri.

Sumber

antaranews.com, 16 Mei 2022;
cnnindonesia.com, 17 Mei 2022;
nasional.sindonews.com, 14 Mei 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official



EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q
Monika Suhayati
Nidya Waras Sayekti
Edmira Rivani
Dewi Wuryandani

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022